

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2015:116) merupakan kesatuan-kesatuan hidup manusia. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akat kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Adapun menurut Selo Soemardjan (1974) dalam Maryani et, al (2019:3) mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Sosial ekonomi menurut Soekanto dalam Abdulsyani (2007:92) adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Jadi dapat diartikan bahwa aktivitas sosial ekonomi berkaitan dengan segala perilaku, pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain dalam lingkungannya.

2. Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Nelayan menurut Brandt (1984:4) dalam (Siombo, 2010:3) adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Hal ini sejalan dengan definisi nelayan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut nelayan dan nelayan kecil memiliki definisi yang berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi pembuat undang-undang membedakan berdasarkan skala besar-kecil penangkapan.

b. Jenis-Jenis Nelayan

Penggolongan masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002:2-3) dapat ditinjau dari tiga sudut pandang

- 1) Segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain) serta dilihat dari struktur masyarakat nelayan terbagi dua (nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh (hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas)
- 2) Berdasarkan tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil.

3) Berdasarkan teknologi peralatan tangkap yang digunakan terbagi ke dalam kategori nelayan tradisional dan nelayan modern.

Sedangkan Charles (2001) dalam Satria (2015:32) membedakan nelayan berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pola *human systems* dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori nelayan, yaitu:

- 1) *Subsistence fishers*: nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari
- 2) *Native indigenous/aboriginal fishers*: kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsiten.
- 3) *Recreational fishers*: nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.
- 4) *Commercial fishers*: nelayan untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

c. Kegiatan Nelayan

Kegiatan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga nelayan sangatlah berkaitan. Kegiatan produksi dari penangkapan ikan, peran sebagai pemasok tenaga kerja, penjual hingga mengonsumsinya dan rumah tangga nelayan juga dapat berperan sebagai pengolah ikan.

Ekonomi rumah tangga nelayan biasanya masih bersifat semi komersial yang dicirikan: 1) kegiatan antara produksi ikan dan rumah tangga pengolah ikan tidak terpisah, 2) penggunaan tenaga kerja keluarga lebih diutamakan, 3) nelayan dan rumah tangga pengolah ikan masih lebih banyak berperilaku sebagai penerima harga, dan 4) menutamakan keamanan (Muhammad, 2011: 188-189).

d. Kendala Nelayan

Menurut Arief Satria (2012) dalam Rahman (2015) permasalahan di seputar nelayan dari sisi politik ekonomi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan minimnya kemampuan pengelolaan sumberdaya laut dan terjadinya kemiskinan dalam kehidupan para nelayan,

- 1) Nelayan Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses modal dan akses teknologi yang diperlukan untuk mendorong secara maksimal kemampuan kerjanya
- 2) Banyaknya nelayan Indonesia yang statusnya masih merupakan buruh nelayan
- 3) Sulitnya para nelayan mencari bank termasuk bank pemerintah yang mau memberikan pinjaman sebagai modal
- 4) Adanya praktik penjarahan ikan secara illegal
- 5) Minimnya sinergi antara pemerintah dan stakeholder lain yang berkepentingan dalam pembangunan perikanan kelautan, hingga

penerapan peraturan perundang-undangan yang dirasa kontraproduktif dengan usaha peningkatan kesejahteraan nelayan

6) Beberapa kebijakan pemerintah melalui penerbitan perundang-undangan juga seringkali dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kesejahteraan nelayan.

3. Pelabuhan Perikanan

a. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan menurut Sasono (2012:1) pelabuhan merupakan pintu keluar-masuknya berbagai arus yang dilihat dari aspek ekonomi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu..

Adapun pelabuhan perikanan menurut Wati dan Primyastanto (2018:24) adalah pelabuhan yang khusus menampung kegiatan masyarakat baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan, maupun aspek pemasarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan ikan baik yang terdapat bangunan untuk tambat (dermaga) maupun yang tidak ada bangunan (Lumaksono, 2013:10).

b. Fungsi dan Peran Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, peran pelabuhan meliputi:

- 1) Simpul dalam jaringan transportasi
- 2) Pintu gerbang kegiatan perekonomian
- 3) Tempat kegiatan alih moda transportasi
- 4) Penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan
- 5) Tempat distribusi, produksi, konsolidasi muatan atau barang
- 6) Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara

c. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan dan Fasilitasnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012:

Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- 1) Pelabuhan Perikanan Kelas A, disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
- 2) Pelabuhan Perikanan Kelas B, disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
- 3) Pelabuhan Perikanan Kelas C, disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
- 4) Pelabuhan Perikanan Kelas D, disebut Pangkalan Pendaratan Ikan

Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi:

- 1) fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase,
- 2) fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik
- 3) fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan mandi cuci kakus.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang digunakan Penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

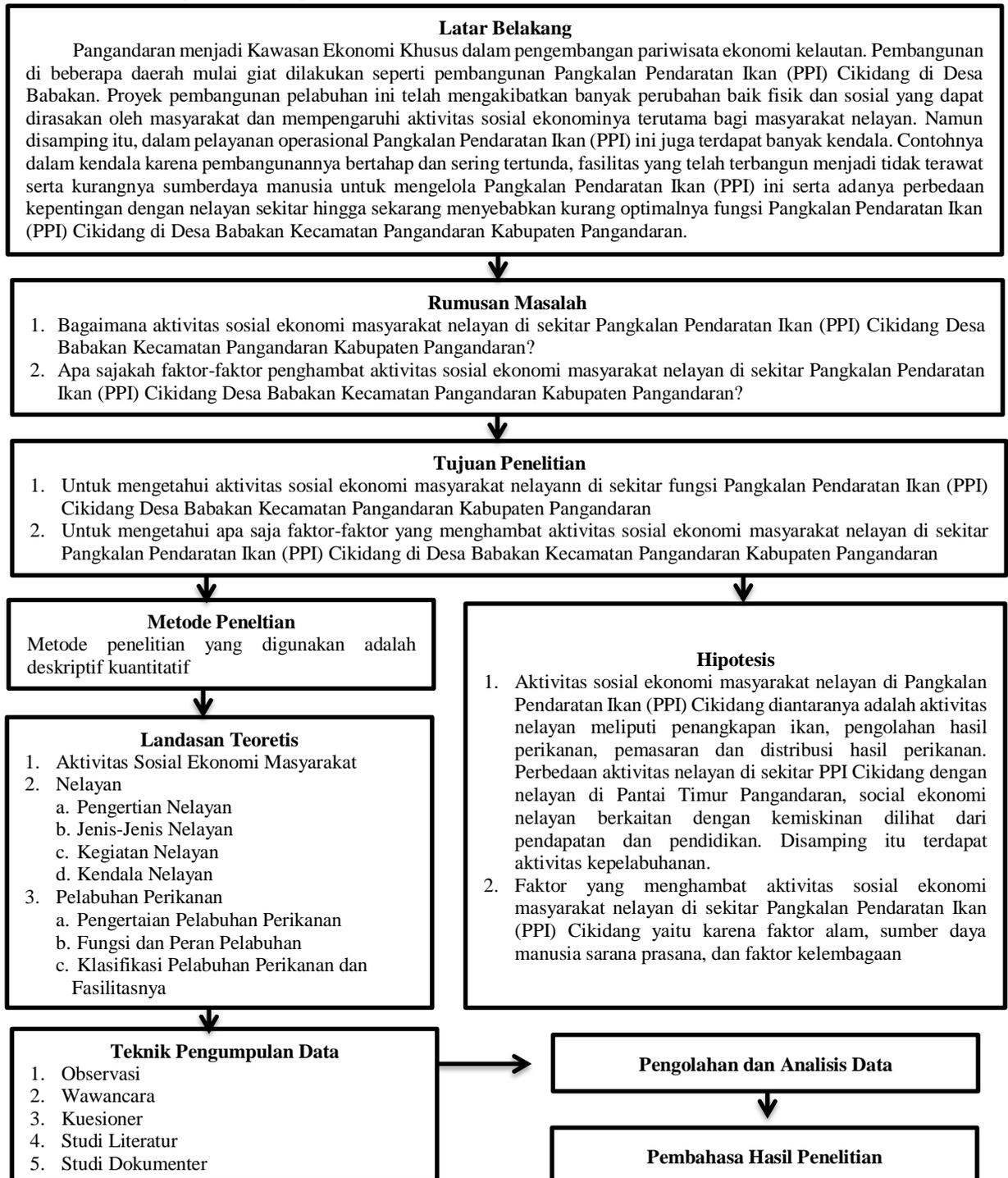
1. Doni Kosdiansah (2012), yang berjudul “Kajian Geografis Terhadap Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis”. Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dalam objek penelitian yakni nelayan di PPI Cikidang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kajian rumusan masalah yakni masalah pasca pembangunan.
2. Sri Utami (2015), yang berjudul “Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur”. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dalam aspek kajian yaitu untuk mengetahui aktivitas sosial-ekonomi di pelabuhan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi kajian dan metode yang digunakan. Penelitian relevan dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Aspek	Doni Kosdiansah (2012)	Sri Utami (2015)	Penelitian Julaeha (2020)
1.	Judul	Kajian Geografis Terhadap Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis	Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
2.	Rumusan Masalah	1. Faktor-faktor geografi apakah yang mendukung pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis? 2. Faktor-faktor geografi apakah yang menghambat pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis	1. Bagaimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana kontribusi Pelabuhan Bulu bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur? 3. Bagaimana hubungan adanya Pelabuhan Perikanan Bulu dengan perubahan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Jawa Timur?	1. Bagaimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat aktivitas masyarakat nelayan Desa Babakan di (PPI) Cikidang bagi masyarakat nelayan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
3.	Lokasi	Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis	Sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
4.	Metode Penelitian	Metode Deskriptif Kuantitatif	Metode Kualitatif	Metode Deskriptif Kuantitatif
5.	Hipotesis Penelitian	1. Faktor-faktor geografi yang mendukung pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis adalah: lokasi yang strategis kebutuhan nelayan Pangandaran untuk memiliki dermaga tempat menyimpan perahu dan membuka lapangan pekerjaan 2. Faktor-faktor geografi yang menghambat pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis adalah: daerah rawan bencana alam daerah sedimentasi dan kebijakan pemerintah, yang kurang mendukung.	-	1. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang diantaranya adalah aktivitas nelayan meliputi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Disamping itu terdapat aktivitas kepelabuhanan, dan wisata alam. 2. Faktor yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang yakni karena faktor alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan faktor kelembagaan.

Sumber: Data Pengelolaan Penelitian (2020)

C. Kerangka Konseptual



Sumber: Data Pengelolaan Penelitian (2020)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Nasution (2014: 39) adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau rekaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Maka hipotesis juga dapat disebut sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan berkaitan dengan perikanan dan kelautan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang diantaranya adalah meliputi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan, perbedaan aktivitas nelayan di sekitar PPI Cikidang dan Pantai Timur Pangandara, social ekonomi nelayan berkaitan dengan kemiskinan nelayan dilihat dari pendapatan dan pendidikan. Disamping itu terdapat aktivitas kepelabuhanan.
2. Faktor yang menghambat ktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang yaitu karena faktor alam seperti cuaca dan iklim, sumber daya manusia (jumlah dan pemanfaatan teknologi), sarana prasana dan faktor kelembagaan.